

## PENGELOLAAN KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET TETAP BARANG MILIK NEGARA DI UNIVERSITAS RIAU

Khairul<sup>1</sup>, Muhammad Firdaus<sup>2</sup>, Anuar Rasyid<sup>3</sup>

[khairul@staff.unri.ac.id](mailto:khairul@staff.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [Muhammad.firdaus@ulecturer.unri.ac.id](mailto:Muhammad.firdaus@ulecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,

[anuar.rasyid@lecturer.unri.ac.id](mailto:anuar.rasyid@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pengelolaan Komunikasi Organisasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Komunikasi Organisasi dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Aset tetap di Universitas Riau, melalui metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses komunikasi organisasi khususnya dalam perencanaan dan penganggaran sudah berjalan cukup baik dimana komunikasi bersifat dua arah dan memiliki umpan balik yang baik namun hanya dalam konteks kegiatan penyusunan anggaran saja. Dalam konteks pengawasan, komunikasi dari atas kebawah dan komunikasi antara sesama pegawai belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada saat penyerahan dari penyerahan dokumen pekerjaan tahun anggaran 2019 dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada KPA tidak dapat menyerahkan dokumen TOR/KAK yang merupakan sebagai sumber input dari RBA dan RKA KL, yang mengakibatkan pedoman untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak teratur dan terukur. Pengelolaan komunikasi organisasi dalam evaluasi penatausahaan barang milik negara belum mendapatkan *feedback* yang baik, diakibatkan tidak adanya perubahan paradigma akan barang milik negara dilingkungan Universitas Riau membuat nilai informasi tentang barang milik negara masih rendah.

**Kata Kunci:** Komunikasi Organisasi, Penatausahaan, Pengelolaan, Barang Milik Negara

### Abstract

*Management of Organizational Communication, Management and Administration of State Property. This paper aims to describe the Management of Organizational Communication in the Management and Administration of State Assets of fixed assets at the University of Riau, through the Qualitative Descriptive method. The results showed that in the process of organizational communication, especially in planning and budgeting, it has run quite well where communication is two-way and has good feedback, but only in the context of budgeting activities. In the context of supervision, communication from the top down and communication between fellow employees has not been carried out properly. This can be seen when submitting the submission of fiscal year work documents from PPK (Commitment Making Officials) to KPA unable to submit TOR / KAK documents which are a source of input from RBA and RKA KL, which results in guidelines for procurement activities of irregular goods and services and measured. Management of organizational communication in the evaluation of administration of state property has not received good feedback, due to the absence of a paradigm shift in state property within the University of Riau, making the value of information about state property still low.*

**Keywords:** Organizational Communication, Administration, Management, State Property

## PENDAHULUAN

Pada Proses Penatausahaan BMN, dalam penginputan kedalam Aplikasi SIMAK BMN nomor SP2d sangat dibutuhkan. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah surat yang dipergunakan untuk pencairan dana lewat bank yang ditunjukan setelah surat perintah membayar (SPM) diterima oleh Kuasa BUD. Di Universitas Riau terdapat dua jenis SP2D yaitu SP2d yang berasal dari dana pusat (BOPTN) dan dana yang berasal dari BLU (Badan Layanan Umum) dana UNRI. Penerbitan SP2D BLU dan BOPTN memiliki proses penerbitan yang berbeda, penerbitan SP2D dana BOPTN memiliki aturan setelah 5 hari kerja paling lambat setelah pekerjaan dilakukan, dan penerbitan SP2D dana BLU menunggu seluruh Dokumen pembelian dari seluruh unit kerja yang berada dilingkungan Universitas Riau.

Kegiatan penatausahaan BMN (Pencatatan, Inventarisasi dan Pelaporan) sangat berhubungan dengan bagian keuangan, dimana seluruh data-data yang akan dibuat

untuk laporan BMN merupakan *output* dari bagian, perlunya memiliki komunikasi yang baik berupa informasi–informasi secara teknis dan non teknis dalam pengelolaan BMN dan keuangan, sehingga dapat mengharapkan *feedback/* perilaku yang positif dalam menjalankan tugas/ kerja dari ruang lingkup masing–masing yang akan dirangkum menjadi satu laporan keuangan Universitas Riau.

Pada kegiatan inventarisasi semester II Tahun 2016 masih terdapat barang atau bangunan gedung yang tidak terdaftar sebagai aset yang dikuasai oleh Universitas Riau, dengan kata lain barang atau bangunan tersebut tidak memiliki dokumen, kontrak atau data sumber yang dianggap sah, sehingga barang, bangunan dan gedung dan alat angkutan (Mobil Dinas) yang tidak memiliki data sumber menjadi kategori barang berlebih. Menurut Operator Unri mengatakan hal ini terjadi disebabkan lima tahun belakang Aplikasi SIMAK BMN belum begitu diperhatikan dari pihak internal baik itu dari segi pengelolaan ataupun

penatausahaan, hingga sekarangpun pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara masih kurang diperhatikan,

Dengan penjelasan dan permasalahan diatas sangat dibutuhkannya saling koordinasi dan memiliki pengetahuan yang sama antara Keuangan dan barang milik negara, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diterima dan proses pelaporan dapat berjalan dengan lancar, akan tetapi pada kenyataannya Universitas Riau mengalami keterlambatan pelaporan Barang Milik Negara, dan pada saat Rekonsiliasi antara BMN dan Keuangan terdapat nilai yang selisih ataupun yang belum di input. Dalam hal ini Universitas Riau selaku UAKPB selaku Kuasa Pengguna Barang menerima surat teguran atas keterlambatan pelaporan SIMAK BMN.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas bahwa komunikasi dalam organisasi memiliki manajemen komunikasi dalam suatu organisasi baik itu dalam penyebaran informasi ataupun dalam melaksanakan perintah

atasan ataupun pertukaran informasi. Tujuan peneliti memfokuskan pengelolaan komunikasi organisasi dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara. Dimana setiap kegiatan penatausahaan/pengelolaan BMN harus memiliki koordinasi dengan bagian terkait, dan semakin memiliki pemahaman dan konsep yang sama maka akan terciptanya pemikiran dan kesepakatan yang baik tentang permasalahan BMN tersebut.

Melihat begitu saling keterkaitan dalam pengelolaan/penatausahaan barang milik negara ini dalam melaksanakan pekerjaannya melibatkan pihak terkait dalam suatu organisasi terutama Kuasa Pengguna Barang (Pimpinan Satker) dalam mengambil keputusan serta mulai dari bagian perencanaan hingga bagan pengadaan. Penjelasan diatas membuat peneliti tertarik untuk lebih memperdalam dan mengetahui *"Bagaimana Pengelolaan Komunikasi Organisasi Dalam Pengelolaan Dan Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara Di Universitas Riau"*.

Tinjauan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini digunakan Teori Sistem dan Teori Integrasi Informasi. Adapun penelitian terdahulu yang relevan penelitian ini bertujuan dan melihat perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian Subar (2013) mengenai “Pengelolaan Komunikasi Organisasi dalam membangun Citra Sekolah Adiwiyata di tahun 2013 (Studi Kasus di SMA Negeri 5 Tangerang) dan Andri Haryapinandita Widyakusuma (2017) dengan judul Komunikasi Organisasi pada Industri Kreatif (Studi Kasus Praktik pada TAKA *Publisher* dan *Eight Wonders*).

### **Proses Komunikasi**

Proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat, berkaitan dengan siapa pengirimnya (komunikator), apa yang dikatakan atau dikirimkan (pesan), saluran komunikasi apa yang digunakan (media), ditujukan untuk siapa

(komunikasi), dan apa akibat yang akan ditimbulkannya (efek). Dalam proses komunikasi, kewajiban seorang pengirim atau komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesannya dapat diterima oleh penerima (komunikasi) sesuai dengan kehendak pengirim.

### **Komunikasi Organisasi**

Menurut Zelko dan Dance dalam (Romli Komsahrial, 2014), “komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal”. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terdapat pada organisasi itu sendiri, yang terdiri dari pihak internal yang berhubungan dengan organisasi tersebut, Komunikasi internal berhubungan dengan komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal merupakan komunikasi dua arah seperti pimpinan dengan karyawan maupun sebaliknya karyawan dengan pimpinan, dan komunikasi horizontal merupakan komunikasi terhadap sesama tingkatan seperti komunikasi

yang dilakukan sesama karyawan yang memiliki tingkatan yang sama atau sederajat.

### **Pengelolaan**

Menurut Balderton (Adisasmita Rahardjo, 2011), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

### **Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara**

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No.1 Tahun 2004 Pengelolaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan sampai dengan penghapusan Barang Milik Negara dan tindaklanjutnya berupa pemindahtanganan yang seluruh kegiatannya di tatauahakan serta dilakukan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus pembendaharaan.

### **Penatausahaan Barang Milik Negara**

Pasal 1 Ayat 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang penatausahaan Barang Milik Negara, Seluruh Barang Milik Negara merupakan objek penatausahaan, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Penatausahaan Barang Milik Negara meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara. Dalam penatausahaan Barang Milik Negara ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi Barang Milik Negara.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Sugiyono, 2012) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-

pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena proses dalam Penatausahaan Barang Milik Negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Komunikasi Organisasi Dalam Perencanaan dan Penganggaran Barang Milik Negara di Universitas Riau**

Musrenbang ini merupakan salah satu kegiatan pertukaran informasi yang akan implementasikan pada tahun depan, dimana komunikatornya yaitu pimpinan bagian/kasubag yang

menyampaikan berupa ide atau informasi untuk meningkatkan kinerjanya dan anggaran didalam sebuah persentasi pada kegiatan tersebut dan yang menjadi komunikannya adalah pimpinan Unit/Fakultas seperti Dekan dan Wakil Dekan yang menampung informasi/ide-ide yang telah disampaikan sekaligus menilai apakah pesan-pesan yang disampaikan dapat dilaksanakan atau tidak. Nanti hasil dari kegiatan musrenbang tersebut akan di persentasikan oleh pimpinan Unit/Fakultas pada kegiatan musrenbang tingkat Universitas bersama dengan Rektor.

Unri untuk saat ini belum menerabkan seutuhnya, RKBMN untuk sementara ini jika belanja modal yang menggunakan dana bantuan dari Pusat (BOPTN) dan itu pun pada Pembangunan Gedung, Renovasi dan pengadaan kendaraan dinas saja Pada pernyataan diatas menyatakan, selama ini pada perencanaan dan penganggaran dengan Bagian Pengelola BMN belum ikut andil dalam memberikan informasi – informasi

tentang regulasi baik itu secara teknis ataupun non teknis BMN, dimana semestinya pihak – pihak terkait khususnya BMN terlibat mulai dari Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan dan sampai pada penghapusan, namun komunikasi antara sesama pegawai dan komunikasi dengan pimpinan bagian dan bagian yang terkait dalam perencanaan dari BMN ini baru terjadi dua tahun belakangan ini.

Lemahnya pengawasan atas perencanaan dan kontrol dalam implementasi kegiatan perencanaan dan penganggaran, sehingga dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa masih bersifat abu-abu atau umum, itu disebabkan kurangnya data dukung yang diberikan Unit/Fakultas kepada Bagian Perencanaan yakni KAK (Kerangka Acuan Kerja) dimana dokumen tersebut seperti proposal namun memiliki spesifikasi barang dan nilai perkiraan barang. Ini kalau kita berbicara secara idealnya, dimana kita dapat menarik tali merahnya untuk mendapatkan integrasi data.

Komunikasi vertikal baik itu dari atasan ataupun kebawah dalam konteks pengawasan implementasi perencanaan dan penganggaran masih sangat minim dan belum efektif, yang semestinya perlu dilakukan pengawasan dan memonitoring dalam implementasinya, kurang baiknya pengelolaan komunikasi dalam organisasi apakah itu dari komunikasi bawahan kepada atasan dan sebaliknya membuat pegawai tidak memiliki kepastian akan pekerjaannya, sehingga apa yang menjadi pedoman/acuan tidak terarah lagi. Hal ini terlihat pada saat penyerahan pekerjaan dari PPK kepada KPA pada tahun anggaran 2019, dimana PPK yang lama atau tidak di gantikan pada unit/fakultas tersebut tidak dapat memberikan TOR/KAK perencanaan yang telah dibuat awal tahun.

Komunikasi Horizontal antara sesama pegawai pesan-pesan yang disampaikan oleh bagian perencanaan akan dibutuhkan oleh bagian pengadaan mengenai merek, spesifikasi, jadwal penyelesaian dan nilai anggaran yang akan gunakan yang

terdapat pada dokumen perencanaan TOR/KAK perencanaan, namun hal ini tidak terlaksana karena PPK selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) melakukan pengadaan berdasarkan RUP yang ditayangkan pada website dan TOR/KAK perencanaan dan pengadaan kerap memiliki perbedaan, sehingga pada TOR/KAK pengadaan mengalami perbedaan, sehingga komunikasi vertikal ataupun horizontal dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran mendapatkan *feedback* hanya dalam konteks penyusunan anggaran saja tidak dalam implementasikan anggarannya.

Menurut (Adisasmita Rahardjo, 2011)mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien." Apabila dikaitkan dengan definisi komunikasi organisasi dari segi pengelolaan tidak efisien dan efektif karena masih minimnya pengawasan

dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran dan terkait dengan komunikasi organisasi diatas terdapat beberapa konsep yaitu pesan, jaringan dan saling ketergantungan; dimana pesan yang efektif itu yakni apa yang pesan yang disampaikan sama dengan pesan yang diterima oleh pengirim, pesan (TOR/KAK) yang disampaikan dari perencanaan dan penganggaran tidak sama dengan implementasinya/ pengadaan, dimana semestinya mulai dari perencanaan dan penganggaran, bagian keuangan dan pengadaan merupakan satu jaringan yang saling berkaitan dan saling membutuhkan, jika satu bagian mengalami gangguan maka akan berpengaruh pada bagian lainnya, hal ini berdampak juga dengan pembuatan laporan Barang Milik Negara.

Asumsi yang kedua yaitu hubungan yang saling ketergantungan, bahwa implikasi penting dari hubungan saling ketergantungan ini adalah bahwa bagian-bagian dari sistem satu sama lain saling mempengaruhi (Littlejohn, 1989 :172), yang dimaksud adalah

hubungan antara bagian perencanaan dan penganggaran dan pengadaan semestinya memiliki kesamaan data dalam mengimplementasikan hasil perencanaan dan penganggaran tersebut sesuai dengan TOR / KAK yang telah dibuat pada awal tahun, dan asumsi yang terakhir yaitu memiliki akhir yang sama menjelaskan sistem dengan kondisi awal yang berbeda memiliki kemungkinan untuk berevolusi ke titik yang sama dengan berbagai cara, jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah kesamaan data dari bagian Perencanaan dan Penganggaran semestinya memiliki kesama pada hasil pelaporan nanti, khususnya yang berkaitan dengan aset tetap barang milik negara, walaupun secara teknis antara bagian- bagian dari sistem memiliki perbedaan.

Dengan penjelasan diatas proses komunikasi dalam organisasi khususnya Universitas Riau dalam konteks perencanaan dan penganggaran yang baik, dimana pesan yang dituangkan TOR/KAK, RBA dan RKA KL(Dipa) disampaikan oleh bagian perencanaan dan penganggaran

sebagai komunikatornya, tidak diterima dengan baik oleh komunikan yaitu unit/fakultas yang berada dilingkungan Universitas Riau, hal ini dilihat berdasarkan dimana TOR/KAK perencanaan dan penganggaran masih ada beberapa yang berbeda dengan TOR/KAK Pengadaan. Dimana berdasarkan Kotler (2000: 251) Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi adalah agar tindakan atau perubahan sikap pada penerima sesuai dengan keinginan pengirim. Akan tetapi arti suatu pesan akan dipengaruhi oleh bagaimana penerima merasakan pesan itu sesuai dengan konteksnya.

### **Proses Komunikasi Organisasi Dalam Pengadaan Barang Milik Negara di Universitas Riau**

Pengadaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memiliki Barang Milik Negara melalui suatu rangkaian proses baik melalui jual beli, maupun lelang. Pengadaan juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan Barang Milik Negara dan Jasa. Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJ

(Pengadaan Barang Dan Jasa) Pemerintah pada pasal 1 ayat 10 menjelaskan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pada saat pengadaan belum pernah terjadinya komunikasi antara Bagian Barang Milik Negara dan PPK pengadaan akan kontrak yang dibuat/ akan dicairkan sudah berdasarkan aturan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara secara teknis, namun yang selama ini terjadi yaitu kontrak-kontrak yang sudah dicairkan dan sudah selesai baru diserahkan ke bagian Barang Milik Negara untuk diinput ke dalam aplikasi SIMAK Barang Milik Negara, tentang komunikasi antara bagian keuangan akan pencairan dana berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan pengelolaan Barang Milik Negara belum pernah terjadi, kecuali jika sudah terjadi

permasalahan baru di konsultasikan pada bagian Barang Milik Negara .

Penjelasan pada perencanaan dan penganggaran diatas, bahwa dalam pelaksanaan masih minimnya komunikasi yang bersifat dari atas atau kebawah dalam konteks pengawasan pada kegiatan perencanaan yaitu dokumen TOR/KAK yang merupakan sumber inputan dari RBA (Rencana Bisnis Anggaran) dan RKA KL yang telah disahkan menjadi DIPA. Kalaupun ada pengawasan ataupun kontrol pengadaan hanya berdasarkan pada daya serap anggaran yang berasal dari bagian keuangan yang dilakukan pada tengah tahun.

Berdasarkan definisi komunikasi organisasi menurut *Goldhaber* (dalam Romli 2014:113) komunikasi organisasi adalah proses dalam menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan serta saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan selalu berubah-ubah. Hal tersebut tidak terjadi saling tukar menukar pesan antara bagian perencanaan dan penganggaran dengan bagian keuangan serta PPK

sebagai panitia pengadaan dalam mencocokkan data TOR/KAK yang merupakan sumber dari inputan RKA KL untuk mengatasi perbedaan pengadaan barang yang telah direncanakan diawal, dan tidak ada pertukaran informasi dan pesan dari bagian keuangan dalam konteks berkordinasi akan dokumen TOR/KAK untuk melakukan pencairan dana pengadaan. Dengan kejadian tersebut bisa saja perencanaan yang diawal berbeda dengan pada saat implementasinya, dan hal ini juga dapat dilihat pada saat penyerahan pekerjaan dari PPK kepada KPA (rektor) tahun anggaran 2019, dimana beberapa PPK tidak dapat menyerahkan dokumen TOR/KAK yang sudah selesai tahun anggarannya.

**Pengelolaan Komunikasi Organisasi Dalam Evaluasi Hasil Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara di Universitas Riau berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007.**

**Pembukuan pada Aplikasi SIMAK Barang Milik Negara (Pengkalsifikasian, Kodefikasi, dan Kapitalisasi**

Dalam kegiatan pembukuan operator unit / fakultas melakukan komunikasi secara horizontal dengan operator Barang Milik Negara rektorat untuk berkordinasi tentang teknis pembukuan yang akan dilakukan, seperti pemukuan perolehan pembelian dari kontrak yang membutuhkan nomor SP2D yang diperoleh dari keuangan Aklap Rektorat, biasanya operator Rektorat melakukan kordinasi dengan bagian keuangan AKLAP apakah nomor SP2D pencairan dari bulan sekian sampai triwulan sudah terbit, lalu operator rektorat berkomunikasi dengan operator Unit/ Fakultas apakah dari rekap daftar nomor SP2D tersebut ada sudah cair, biasanya itu di-*share* di Whatsapp Group Barang Milik Negara Universitas Riau.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tahun 2015 Universitas Riau selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) menerapkan untuk membentuk UAPKPB (Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang) yaitu merupakan unit/fakultas yang berada di lingkungan Universitas Riau, dimulai dengan memisahkan database rektorat menjadi 18 Unit/Fakultas, dengan demikian segala proses pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara akan dilakukan oleh operator yang berada di Unit/Fakultas. Hal ini berkaitan dengan teori sistem, dimana asumsi utamanya yaitu sistem.

*Kathleen Galvin dan Bernard Brommel* (1996, ms. 50) mendefinisikan sistem sebagai "Seperangkat komponen yang saling berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk suatu keseluruhan yang utuh." Dalam kontek pengelolaan Barang Milik Negara, mulai dari bagian Perencanaan dan Penganggaran, Bagian Keuangan, Bagian Pengadaan (PPK) dan subbagian pengelola barang milik negara saling berhubungan antara

satu sama lain, berawal dari perencanaan dan bagian Keuangan dapat melakukan verifikasi dengan bagian BMN dengan mencocokkan data yang dibutuhkan dalam pembukuan, dilanjutkan pada bagian pengadaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, setelah barang selesai diadakan agar dapat memberitahukan kepada bagian BMN untuk dilakukan pencatatan ataupun pembukuan pada aplikasi simak BMN. Namun hal demikian belum dapat dilihat akan memahaminya bahwa setiap bagian yang berada di Universitas Riau khususnya adalah saling berhubungan, sehingga ketika barang yang telah datang ataupun pekerjaan yang sudah selesai tidak ada pemberitahuan kepada bagian barang milik negara, dan akan kebutuhan data yang berasal dari bagian keuangan hal dialami di rektorat ataupun fakultas akan terlambatnya dokumen kontrak/nomor SP2D yang tidak sampai ke bagian BMN untuk di lakukan penginputan/pembukuan ke aplikasi simak BMN. Sehingga pada asumsi yang kedua dari teori sistem yaitu hubungan

saling ketergantungan yaitu Karena komponen sistem yang saling terkait, perilaku setiap komponen akan mempengaruhi keseluruhan komponen yang lainnya (Galvin & Brommel, 1996; Hanson, 1995; Littlejohn, 1989). Dengan ketidak sesuaian asumsi kedua ini membuat kegiatan pembukuan yang semestinya dilakukan diawal waktu dapat membuat kegiatan pembukuan barang milik negara bersamaan dengan pembuatan laporan BMN pada akhir tahun.

Berkaitan dengan teori integrasi informasi, teori ini berasumsi bahwa manusia mengorganisasikan informasi yang diperolehnya tentang sekelompok orang, objek, situasi atau ide-ide untuk membentuk sikap yang sesuai dengan konsep yang terbentuk dari hasil penerimaan informasi tersebut (Littlejohn 2009:226). Berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara, anggapan akan barang milik negara ini merupakan hal yang sepele atau kegiatan yang hanya membeli barang dengan uang kantor lalu setelah rusak boleh dibawah pulang, akan cara pandang seperti ini membuat

pengelolaan barang milik negara ini cukup membuat terhambatnya kegiatan pembukuan ini, karena setiap permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik negara ini masih belum begitu serius di evaluasi agar dapat berjalan dengan lancar, hal ini dapat permasalahan dokumen dan nomor SP2D ini selalu terjadi dalam kegiatan pembukuan.

Tidak adanya kegiatan semacam seminar non teknis ataupun teknis yang melibatkan bagian-bagian terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara ini agar dapat memiliki pemahaman yang sama dan dapat mendapatkan perilaku yang baik akan barang milik negara ini. Teori integrasi informasi membantu menjelaskan bagaimana orang-orang berpikir dan membentuk sikap merupakan suatu hal penting dalam komunikasi. Teori ini membangun pemahaman bagaimana orang-orang dipengaruhi oleh informasi. Informasi adalah salah satu dari kekuatan tersebut dan dapat mempengaruhi sebuah sistem kepercayaan atau sikap individu. Dengan terjadinya

penyamaan informasi akan teknis dan nonteknis tentang pengelolaan barang milik negara ini ini dapat merubah kepercayaan/sikap pimpinan dalam mengevaluasi permasalahan dalam pengelolaan barang milik negara ini.

### **Inventarisasi Barang Milik Negara**

Sebagai mana jabarkan bahwa kewajiban Inventarisasi Barang Milik Negara diamanatkan dalam pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara yang menyebutkan "Pegawai Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/ Daerah sekurang-kurangnya sekali lima tahun". Dan jika Inventarisasi Barang Milik Negara ini terhadap peraturan tersebut dapat mempengaruhi Opini Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Peneliti sendiri adalah orang yang ikut terlibat dalam kegiatan yang diteliti, berdasarkan observasi saya selaku operator SIMAK Barang Milik Negara FEB UNRI selama memegang aplikasi simak Barang Milik Negara dan

melakukan inventarisasi pada tahun 2016 tersebut belum begitu mengenal tentang barang-barang yang di transfer dari rektorat tersebut, ditambah lagi barang-barang yang berada di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis masih terdapat juga barang yang belum memiliki identitas dan kejelasan status barangnya, jika barang tersebut sesuai dengan database dari rektorat maka kita akan catat begitu juga dengan barang yang belum memiliki status yang jelas alias barang berlebih, dan terdapat juga beberapa dari database yang diberika rektorat terdapat klasifikasi dan kodefikasi barang tidak sesuai dengan barangnya, contohnya saja, ditemukan PC. Unit merek Siemens digudang akan tetapi pada aplikasi terkodefikasi sebagai monografi, dilihat dari nilai barang dan jenis yang tercatat pada aplikasi sangat tidak cocok pada nilainya, dengan berpedoman pada nilai tersebut saya memastikan barang tersebut adalah komputer (PC Unit ) bukan monografi.

Permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh fakultas/unit yang berkaitan, karena unit/fakultas

merupakan sebagai Unit pembantu kuasa pengguna barang, dimana yang dimaksud adalah segala proses perubahan data dan laporan harus dilakukan atas izin pimpinan yang ada direktorat yaitu rektor selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang nantinya akan menandatangani laporan Barang Milik Negara ini namun hal ini tidak kunjung selesai juga, dan tidak adanya saling himbuan dari rektorat akan evaluasi dari kesalahan klasifikasi, kodefikasi dan kategori barang tersebut.

Peneliti melihat kurangnya pemahaman akan teknis dan non teknis mulai dari pimpinan hingga bagian-bagian terkait tentang pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, hal ini terlihat ketika akan memperbaiki data hasil inventarisasi lalu tiba intruksi untuk melaksanakan penghapusan barang milik negara dikarenakan adanya tekanan dari pimpinan unit fakultas yang menuntut untuk dilakukan penghapusan, namun secara teknis itu belum bisa dilakukan karena sebelum melakukan penghapusan terlebih dahulu melakukan PSP

(Penetapan Status Pengguna) yang harus disetujui oleh KPKNL pekanbaru.

Dengan melihat masih minim pemahaman pengelolaan dan penatausahaan ini baik secara teknis atau pun non teknis, hal ini berkaitan dengan teori integrasi informasi dimana asumsinya menurut *Martin Fishbein* dalam *Littlejohn* (2009:210), teori ini melihat bagaimana organisasi mengakumulasikan dan mengorganisasikan informasi yang diperolehnya tentang sekelompok orang, objek, situasi atau ide-ide dalam membentuk sikap yang sesuai dengan konsep yang terbentuk dari hasil penerimaan informasi tersebut.

Teori integrasi informasi merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa seseorang mengorganisasikan pesan yang diterimanya. Informasi dianggap memiliki potensi untuk mengubah sikap seseorang jika informasi dianggap sesuai dengan tujuan dan dianggap memiliki kebenaran. Sikap memiliki korelasi dengan keyakinan, persepsi. Belum adanya kegiatan ataupun semacam rapat yang dihadiri oleh pimpinan

rektor, pimpinan unit/fakultas dan bagian lainnya dalam penjelasan teknis dan non teknis tentang penatausahaan barang milik negara, sehingga membuat nilai komunikasi/pesan yang disampaikan untuk evaluasi penatausahaan barang milik negara khususnya inventarisasi ini masih ditanggapi belum begitu serius, namun komunikasi atau pesan yang disampaikan ini berasal dari pihak eksternal seperti pemeriksaan BPK, BPKP barulah memiliki nilai yang tinggi terhadap informasi dari penatausahaan barang milik negara ini.

### **Pelaporan Barang Milik Negara**

Sesuai dengan struktur organisasi akuntansi Barang Milik Negara, Universitas Riau adalah UAKPB dan Unit/Fakultas adalah UAPKPB. Peran UAKPB dipegang oleh subbagian Barang Milik Negara Rektorat Universitas Riau dengan Kasub Barang Milik Negara sebagai penanggungjawabnya. Subbagian Barang Milik Negara Rektorat Universitas Riau atas Barang Milik Negara yang dikuasainya dari awal

perolehan, penatausahaan, sampai dengan pertanggung jawabannya. Penanggungjawab UAPKPB adalah kepala kantor yakni Dekan. Dengan dibentuknya Unit Pembantu yang berada unit/fakultas, dituntut untuk pelaksanaan penyusunan data transaksi Barang Milik Negara dan menyusun laporan Barang Milik Negara berdasarkan penggabungan laporan dari rektorat UNRI.

Laporan Keuangan Universitas Riau merupakan hasil dari data transaksi Barang Milik Negara yang dilakukannya rekon antara subbagian Barang Milik Negara dengan bagian keuangan, laporan keuangan ini berfokus pada MAK 53 belanja modal (aset tetap) dan 525121 persediaan (aset lancar), secara praktisnya hasil pekerjaan dari Subbagian Barang Milik Negara merupakan hasil *Output* dari bagian keuangan, namun memiliki dengan teknis yang berbeda dalam pelaksanaannya, hal ini membuat bagian Barang Milik Negara harus memiliki komunikasi yang solid dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan. Jika teori sistem dikaitkan

penatausahaan barang milik negara ini dengan asumsi saling berhubungan dengan bagian bagian terkait, hal ini terlihat dari proses pelaporan mengalami kendala, yang kendala tersebut diakibatkannya dari kebutuhan akan data–data dari bagian dari sistem yang terkait. Idealnya, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan dan bagian keuangan sampai pelaporan Barang Milik Negara.

Kegiatan pelaporan membutuhkan data dari PPK berupa dokumen kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan/barang dan dari bagian keuangan aklap membutuh nomor SP2D yang akan diinput kedalam aplikasi simak Barang Milik Negara, namun hal tersebut tidak didapatkan operator BMN pada waktu pembuatan laporan setiap akhir tahunnya, tidak bisa input akibat SP2D yang belum sampai pada operator di Unit/Fakultas dan Dokumen Kontrak yang tidak dapat juga, sehingga kerap terjadinya proses kegiatan pembukuan/penginputan rutin pada tahun berjalan akan bersamaan dilakukannya pada saat pembuatan laporan. Dengan

dilakukannya dua kegiatan dalam satu waktu menjadi tekanan waktu proses penginputan tidak teliti membuat pada saat melakukan rekon dengan bagian keuangan terjadi selisih nilai yang dicairkan ataupun kesalahan pengetikan nomor SP2D.

Permasalahan ini dievaluasi hanya permasalahannya untuk menyelesaikan laporan saja dan itu dilakukan hanya komunikasi secara horizontal dan diagonal antara sesama operator dan pimpinan bagian saja dan itu untuk penyelesaian laporan saja dan jangka panjang tidak ada, karena hal ini terus saja terjadi pada saat pelaporan.

Dan jika dikaitkan dengan teori integrasi informasi yang berasumsi bahwa "seseorang mengorganisasikan pesan yang diterimanya, dimana sesuatu informasi dianggap memiliki potensi untuk mengubah sikap seseorang jika informasi dianggap sesuai dengan tujuan dan dianggap memiliki kebenaran" dengan kejadian saat ini belum begitu diperhatikan bagaimana ruang lingkup secara nonteknis ataupun teknis pengelolaan dan penatausahaan barang milik

negara di Unri membuat nilai informasi akan permasalahan barang milik negara ini tidak mendapatkan evaluasi dan solusi jangka panjang. Apabila ada pemeriksaan dari eksternal seperti BPK dan BPKP barulah segala informasi ataupun dievaluasi tentang pengelolaan dan penatausahaan ini dan memiliki nilai derajat yang tinggi dan mendapatkan perilaku yang baik dari bagian-bagian terkait.

## **SIMPULAN**

1. Proses Perencanaan dan Penganggaran dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Universitas Riau, dimulai dari Bagian Perencanaan dan Penganggaran Unri yang bertugas untuk merekap, menginput, dan menyerahkan kepada kementerian keuangan untuk disahkan RKA K/L atau DIPA Unri. Dalam pelaksanaannya kurang pengawasan dan kontrol pada perencanaan dan penganggaran, sehingga antara TOR / KAK (Kerangka Acuan Kerja) memiliki

dua sudut persepsi, yaitu KAK/ TOR Perencanaan dan KAK/ TOR Pengadaan.

Masih kurang integrasi informasi/ atau persamaan persepsi tentang teknis pengelolaan dan penatausahaan yang merupakan suatu sistem yang seluruh bagian-bagian/ unit atau fakultas yang memiliki saling keterkaitan satu sama lain, dan pentingnya pemahaman yang sama dengan bagian perencanaan akan implementasi perencanaan hingga pada implementasinya, sehingga pesan komunikasi horizontal ataupun vertikal antara sesama pegawai dengan pimpinan tentang kegiatan perencanaan dan penganggaran hanya dalam konteks kegiatan penyusunan dan penganggaran saja tidak bersifat berkesinambungan/ berkelanjutan baik itu dalam konteks pengawasan/kontrol pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.

Kurang terlaksananya penyampaian pesan komunikasi dari bagian perencanaan dan penganggaran yang dalam konteks pengawasan dan kontrol terhadap TOR/KAK bukan lah menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga TOR/KAK dalam perencanaan berbeda dengan TOR / KAK dalam pengadaan, secara praktis apa yang tuangkan dalam perencanaan dan penganggaran diawal bisa berubah pada saat pelaksanaannya dari perencanaan tersebut. Semestinya TOR/KAK adalah pedoman dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, karena di dalam Proposal TOR/KAK tersebut terdapat spesifikasi detail tentang kegiatan tersebut beserta merek, jadwal dan pagu anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan tersebut, ditambah dapat menjelaskan *output* dari kegiatan tersebut, hal ini terlihat

pada saat penyerahan hasil pekerjaan dari PPK kepada KPA (Rektor), bahwa PPK selaku pelaksana pengadaan tidak dapat menunjukkan TOR/KAK kegiatan.

2. Evaluasi merupakan tahap untuk mengetahui sejauh mana program/ kegiatan sudah berjalan dengan baik, dalam konteks ini berfokus pada penatausahaan Barang Milik Negara yang memiliki ruang lingkup Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Pada Evaluasi Pembukuan dalam Penatausahaan Barang Milik Negara Unri, belum memperhatikan sepenuhnya tentang pengelolaan Barang Milik Negara dengan secara serius, hal ini terlihat pada penunjukan sebagai pengelola Barang Milik Negara/Operator yang bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara tidak berdasarkan SK ataupun Surat Tugas yang sifatnya mengikat, sehingga sewaktu-waktu

operator dapat berganti kapan saja. Dalam proses pembukuan/pencatatan kedalam aplikasi SIMAK Barang Milik Negara memakan waktu yang lama karena operator yang baru memulai belajar dari awal tentang Aplikasi SIMAK Barang Milik Negara .

Pada struktur organisasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara, UAKPB yaitu Rektorat UNRI dan UAPKPB merupakan dari Unit / Fakultas, jadi pada dasarnya adalah hasil laporan Barang Milik Negara Unri berdasarkan pencocokan data dari laporan Unit/ Fakultas, secara praktis baik atau tidaknya laporan keuangan Unri berdasarkan kerja sama dari seluruh bagian-bagian ataupun unit/fakultas yang terlibat dalam penatausahaan Barang Milik Negara, yakni rektorat, dan unit/fakultas yang berada dilingkungan UnRi, dengan kurangnya pemahaman yang sama tentang pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik

Negara antara Operator dengan Pimpinan membuat perbedaan cara pandang, mengakibatkan komunikasi internal baik itu komunikasi dari atasan ataupun kebawah tidak mendapatkan *feedback* dengan baik dalam konteks pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Unri sudah melakukan kegiatan Inventarisasi pada tahun 2015/2016 yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk memutakhirkan/ *update* kondisi barang dan lokasi barang yang dikuasai, pada kegiatan inventarisasi tersebut terdapat bangunan dan gedung, peralatan mesin yang tidak tercatat sebagai aset Unri atau dikategorikan sebagai barang berlebih dan masih terdapatnya barang seperti peralatan mesin (Printer, Komputer, Proyektor, Kursi Besi/ Metal dan lain-lain) yang tidak terlabelisasi bahkan tidak tercatat didalam database SIMAK Barang Milik Negara.

Hal ini disebabkan pembelian yang tidak terdeteksi oleh belanja modal, dengan maksud bahwa menggunakan MAK lain, dan dahulu pengelolaan barang milik negara ini masih tidak dipedulikan bahkan dalam pemeriksaandari eksternal pun belum begitu direview, sehingga dalam membuat barang milik negara ini sama seperti dahulu dimana barang yang rusak ataupun hilang tidak ada administrasinya, melihat dari permasalahan diatas kurangnya perhatian terhadap hasil inventarisasi tersebut sehingga barang dikategorikan berlebih tersebut tetap tidak terdaftar dan tidak terlabelisasi, yang semestinya dari hasil inventarisasi ini dapat di evaluasi bagaimana kondisi barang-barang yang berada di Unri dan dilakukannya penginputan sehingga terdaftar sebagai asset namun hal ini tidak terjadi. Menurut observasi dengan operator BMN rektorat, kegiatan

inventarisasi 2015/2016 tersebut belum selesai, dengan harapan pada tahun 2017 dapat dilanjutkan, namun saat pengajuan SK kegiatan inventarisasi tidak disetujui oleh pimpinan, kurang berjalan baiknya komunikasi organisasi baik itu vertikal ataupun secara horizontal membuat hasil inventarisasi tidak memiliki hasil yang cukup memuaskan.

Kegiatan komunikasi organisasi baik itu dari atas kebawah belum memberikan tanggapan baik dan solusi akan permasalahan kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara, dan tidak ada integrasi informasi tentang teknis dan non teknis seperti acara seminar tentang pengelolaan penatausahaan Barang Milik Negara yang melibatkan rektor, pimpinan fakultas/ unit sehingga dapat mengubah perilaku (meningkatkan nilai informasi tentang barang milik negara) mulai dari pimpinan hingga pada

bagian-bagian yang terkait dengan Barang Milik Negara dapat memiliki respon/ *feedback* baik sehingga dapat mewujudkan penatausahaan Barang Milik Negara yang baik dan efektif.

Secara praktis jika perencanaannya berjalan dengan baik didukung oleh bagian-bagian lainnya maka dalam pelaksanaan pelaporan dapat berjalan dengan baik dan efektif, selama observasi partisipan dalam pelaporan, selalu terkendala dengan nomor sp2d dan dokumen kontrak yang belum sampai pada operator Barang Milik Negara, bahkan proses pelaporan Desember sampai dengan awal tahun selanjutnya, dimana jadwal pelaporan dibatasi sampai dengan 10 Januari, peneliti melihat pengelolaan komunikasi dalam organisasi di Universitas Riau khususnya dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara kurang baik.

Kurang tersampainya pesan komunikasi oleh bagian perencanaan dan anggaran dalam bentuk dokumen TOR/KAK yang terdapat jadwal penyelesaian pengadaan, membuat TOR/KAK pengadaan berbeda dengan perencanaan sehingga pada untuk penyelesaian pengadaan tidak terjadwal, dan secara tidak langsung pencairan kontrak/pelaporan SPM untuk mendapatkan nomor SP2D dan dokumen kontrak terlambat dan berefek pada pelaporan Barang Milik Negara.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Romli, Komsahrial. (2014). *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta : Kompas Gramedia.